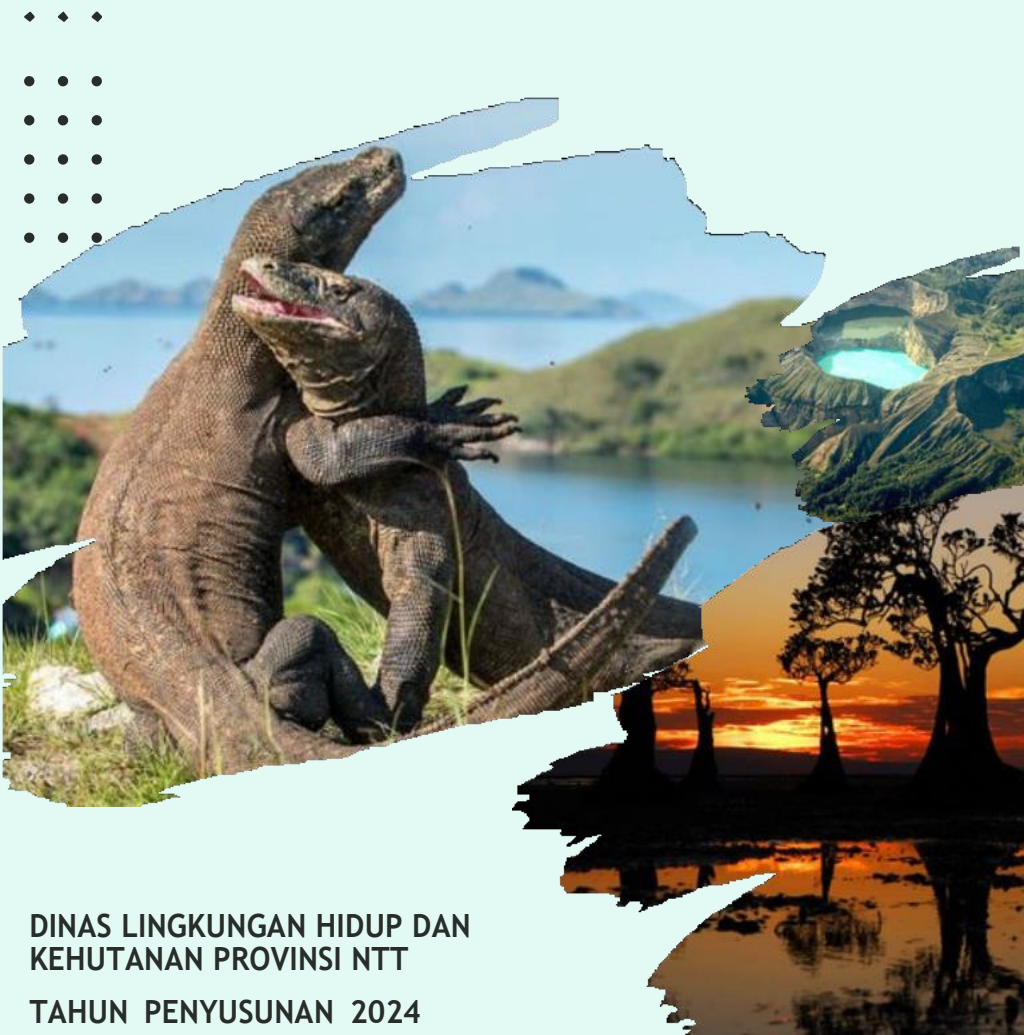




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**RINGKASAN EKSEKUTIF  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI NTT

TAHUN PENYUSUNAN 2024

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik yang wajib untuk didampingi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Dokumen KLHS ini disusun sebelum Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan demikian KLHS ini bersifat *ex-ante*. KLHS ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun meliputi 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD, (2) pengkajian pembangunan berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi.

### Kondisi Umum Provinsi NTT

#### Wilayah Perencanaan

Wilayah Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan dengan luas daratan 4.646.463,43 Ha dan luas perairan 8.074.146,94 Ha. Secara administrasi, Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan Ibukota Provinsi berada di Kota Kupang. Wilayah Fungsional dalam penyusunan KLHS RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 didasarkan pada peta ekoregion yang bersumber dari Menteri LHK RI melalui Keputusan Menteri LHK RI Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alami dan Karakteristik Vegetasi Asli Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000. Luas Wilayah Fungsional Provinsi NTT yaitu 20.121.631,55 Ha.

### Kondisi Lingkungan Hidup

#### 1. Ekoregion

- Dominasi karakteristik ekoregion NTT adalah Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi padang rumput pamah monsun mencakup area 499.887,84 ha (10,76%);
- Karakteristik ekoregion dominan NTT memiliki jasa ekosistem sebagai jasa ekosistem penyedia air, jasa ekosistem budaya rekreasi dan ecotourism, jasa ekosistem pengaturan iklim serta jasa ekosistem pendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan.

#### 2. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

- Daya dukung pangan jika dilihat dari kemampuan daya dukung lahan pertanian yang merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/ padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Menggunakan *Carring Capacity Ratio* (CCR) menunjukkan Sebagian besar wilayah di Provinsi NTT kecuali Kota Kupang sampai dengan Tahun 2029 masih mampu untuk swasembada pangan

sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya, namun demikian rata-rata nilai Indeks Kecukupan Pangan per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, seperti angka prevalensi stunting, pengeluaran pangan, persentase masyarakat tanpa air bersih, dan lain-lain;

- b. Secara keseluruhan, mayoritas area di Provinsi NTT masih memiliki kapasitas dan daya tampung air yang belum terlampaui, mencakup sekitar 68,91% dari total luas wilayah, yaitu sebesar 3.200.914,46 Ha. Kota Kupang menjadi wilayah dengan proporsi terbesar dari luas wilayah yang sudah terlampaui, mencapai 89,34%, atau setara dengan 13.548,83 Ha. Selain Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki proporsi luas wilayah yang terlampaui cukup signifikan, masing-masing mencapai 52,20%, 53,50%, 57,17% dan 80,981%. Kabupaten-kabupaten ini perlu perhatian khusus dalam upaya pencegahan krisis dan kelangkaan air.
- c. Jasa lingkungan/ekosistem; berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/Kep/HK/2020 tentang Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi NTT berbasis Jasa Ekosistem, identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup diwilayah Provinsi NTT menitikberatkan pada 6 (enam) jasa lingkungan hidup, yaitu: (1) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan, (2) Jasa Ekosistem Penyedia Air, (3) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim, (4) Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir, (5) Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Runag Hidup, dan (6) Jasa Ekosistem Budaya *Ecoturism*.

### 3. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan

- a. Jumlah penduduk Provinsi NTT tahun 2022 sebanyak 5.466.285 Jiwa. Proyeksi jumlah penduduk provinsi NTT tahun 2029 sebanyak 6.001,147 Jiwa.
- b. Pertambahan penduduk akan memberikan tekanan terhadap jumlah timbulan sampah. Proyeksi timbulan sampah pada tahun 2029 meningkat menjadi 1.155.221 m3/tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan jumlah sampah. Pengelolaan sampah perkotaan masih menghadapi banyak tantangan antara lain : (1) rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; (2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih dioperasikan dengan sistem open dumping, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem sanitary landfill; dan (4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (Bappenas, 2019);
- c. Nilai IKLH Provinsi NTT dalam 8 tahun terakhir tergolong baik dan masih di atas rata-rata nasional, peringkat 17 dari 34 provinsi di tahun 2022 (nilai IKLH nasional tahun 2022 : 69,22). Penurunan nilai IKLH tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai IKA mencapai -5,66 poin. Selain IKA, terdapat penurunan nilai IKTL dan IKAL. Salah satu faktor penurunan nilai IKAL yaitu pencemaran di kawasan pesisir akibat aktivitas penangkapan ikan yang semakin masif (kebocoran minyak), serta pembuangan limbah domestik dan industri. Sedangkan penurunan IKTL diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan baik tutupan lahan hutan maupun vegetasi non hutan;
- d. Seluas 854.228,87 Ha lahan di NTT berpotensi menjadi kritis. Terdapat beberapa kabupaten dengan luasan lahan kritis dan lahan sangat kritis yang cukup signifikan, seperti Kabuapten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten TTS. sehingga perlu upaya konservasi lahan potensial kritis untuk menghindari dampak penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi Masyarakat;
- e. Berdasarkan pada data Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, menunjukkan bahwa

paparan risiko bencana di Provinsi NTT yang dirinci menjadi keterpaparan sosial, fisik, ekonomi dan Kerusakan lingkungan berada pada kategori sedang dan tinggi terhadap 11 jenis bencana (gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir bandang dan likuefaksi).

#### **4. Kinerja Layanan Jasa Ekosistem**

Keseluruhan Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan DDDT Provinsi NTT menunjukkan dominasi Kelas sedang dan rendah :

- a. Jasa ekosistem penyediaan pangan berada pada dominasi kelas sedang Seluas 2.525.167 Ha;
- b. Jasa ekosistem penyedia air berada pada dominasi kelas sedang Seluas 2.636.056,80 Ha;
- c. Jasa ekosistem Pengaturan Tata Aliran air dan Banjir berada pada dominasi kelas tinggi seluas 1.775.280,47 Ha dan sedang seluas 1.655.058,64 Ha;
- d. Jasa ekosistem Pengatur Iklim berada pada dominasi kelas sedang seluas 2.798.668,45 Ha;
- e. Jasa ekosistem budaya tempat tinggal & ruang hidup berada pada dominasi kelas rendah seluas 2.264.172,53 Ha;
- f. Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan ecotourism berada pada dominasi kelas Dominasi kelas sedang seluas 3.983.639,29 Ha.

#### **5. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

- a. Pertumbuhan ekonomi wilayah di NTT selama tahun 2017-2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan sektor yang tinggi serta besarnya produksi yang dihasilkan. Berdasarkan telaah produksi beberapa komoditas di NTT, diperoleh bahwa komoditas utama dengan produksi dan area pengembangan yang cukup besar di NTT mencakup jagung, sapi, ikan, kopi, kakao dan kelapa. Selain itu, terdapat pula beberapa komoditas yang potensial seperti bambu dan rumput laut;
- b. Dengan memperhatikan isu lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi SDA, seperti perubahan iklim, tekanan penduduk, dan isu-isu pada tingkat nasional dan global lainnya, maka perlu diantisipasi bagaimana kebutuhan pertumbuhan ekonomi kedepannya di NTT dapat berjalan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di NTT sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **6. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim**

Ringkasan kondisi karakteristik wilayah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- a. Hasil proyeksi simulasi kenaikan suhu menunjukkan beberapa daerah pesisir yang akan paling terdampak, terutama pada Pulau Sabu dan Pulau Rote. Dengan karakteristik provinsi kepulauan, perlu diantisipasi bagaimana meningkatkan tingkat adaptasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kerawanan peningkatan suhu permukaan;
- b. Terdapat 38,18% wilayah NTT yang masuk pada kategori rentan terhadap perubahan iklim. Terdapat konsentrasi yang luas di daerah Sumba Barat dan beberapa pulau-pulau kecil yang sepenuhnya masuk ke kategori Tinggi dan perlu diperhatikan, seperti di pulau-pulau kecil di Pulau Sabu, Ende, dan Alor;
- c. Emisi di NTT banyak dikontribusikan dari alih fungsi lahan. Pembukaan hutan lahan kering sekunder menjadi padang rumput/savanna menghasilkan emisi terbesar dengan nilai 38,988,318 ton CO<sub>2</sub> yang diikuti oleh perubahan dari hutan lahan kering sekunder ke semak belukar, pertanian lahan kering campur ke padang rumput hingga konversi pertanian lahan kering campur semak ke pertanian lahan kering;
- d. NTT memiliki risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Dalam 10 tahun terakhir, NTT

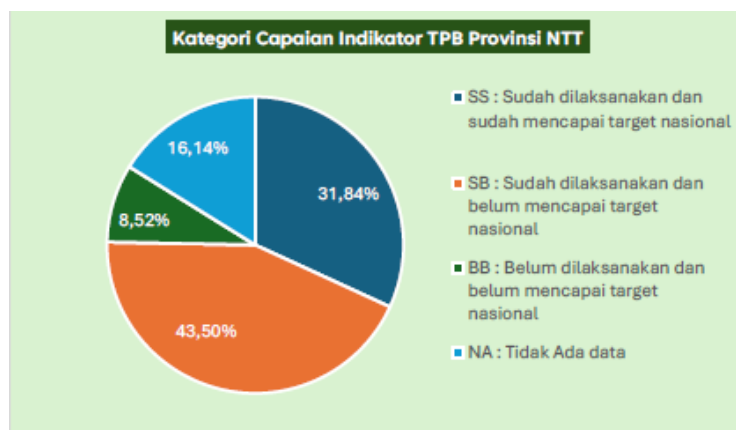
mengalami 576 kejadian bencana dengan angin puting beliung menjadi bencana yang paling sering terjadi, diikuti oleh banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Terdapat beberapa daerah yang diidentifikasi lebih rentan pada bencana tertentu.

## 7. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

- Selama periode 1990-2020, tren perubahan tutupan lahan di NTT menunjukkan peningkatan lahan pertanian dan permukiman. Pada kelas tutupan hutan terjadi penurunan pada hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove primer;
- Kehilangan tutupan hutan yang bersumber dari hutan primer memerlukan perhatian khusus karena kehilangan keanekaragaman hayati dapat lebih tinggi dibandingkan kelas tutupan lahan lainnya;
- Dengan meningkatkan kegiatan manusia di wilayah pesisir, maka tekanan terhadap ekosistem pesisir ini juga akan semakin meningkat;
- Terdapat kerentanan pada beberapa ekosistem pesisir, yakni ekosistem padang lamun, mangrove, terumbu karang, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi pesisir.

## Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dari 235 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hanya 223 indikator yang dianggap relevan dengan Provinsi NTT. Evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi NTT didasarkan pada hasil pelaksanaan indikator TPB yang melekat pada program dan kegiatan 26 (dua puluh enam) perangkat daerah yang memiliki urusan terkait dengan indikator TPB sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana dalam pelaksanaannya didukung oleh LSM/NGO serta pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data pencapaian indikator TPB di Provinsi NTT dibandingkan dengan target menunjukkan bahwa indikator TPB di Provinsi NTT yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 31,84% (71 dari total 223 indikator). Bila dilihat kategori pencapaian, proporsi pelaksanaan TPB Provinsi NTT secara umum didominasi oleh kategori B dengan pencapaian 43,50% atau sebanyak 97 indikator, sedangkan untuk kategori C dan D berturut-turut adalah 8,52% dan 16,14%. Komposisi capaian TPB Provinsi NTT dapat dilihat pada Grafik 1.a berikut.



Gambar 1-a. Prosentase pencapaian indikator TPB di Provinsi NTT

Capaian TPB berdasarkan pilar pada indikator SS tertinggi berada pada pilar sosial sebanyak 36 indikator, diikuti dengan pilar ekonomi sebanyak 19 indikator, pilar lingkungan sebanyak 9 indikator dan pilar hukum dan tata kelola sebanyak 7 indikator. kategori SB



tertinggi pada pilar sosial sebanyak 43 indikator. Kategori BB dan NA tertinggi pada pilar lingkungan dengan jumlah indikator berturut-turut sebanyak 10 dan 13 indikator.

Terdapat 71 indikator TPB dengan kategori SS. TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia dengan ketercapaian sejumlah 15 indikator. Terdapat 97 indikator yang masuk kategori SB, indikator terbanyak pada kategori ini adalah 13 indikator pada TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dan TPB 3 (menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Untuk kategori BB indikator terbanyak berada pada TPB 6 (Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan sebanyak 5 indikator sedangkan untuk kategori NA indikator terbanyak pada TPB 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan) sebanyak 7 indikator. Uraian ketercapaian indikator TPB sebagaimana pada tabel 1.1. berikut.

Tabel 1-a. Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Provinsi NTT

NO TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	KategoriCapaian			
			A	B	C	D
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	6	13	1	4
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	6	5	0	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	15	13	0	5
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	10	2	8	0	0
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	15	7	4	0	4
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	2	8	5	3
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	6	2	2	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	1	11	3	4
6	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	6	4	1	2
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar negara	9	3	5	1	0
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	3	2	1	7
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	1	2	1	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3	0	1	1	1
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	3	2	1	0	0

15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	7	1	3	2	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	18	7	10	1	0
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	7	5	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>223</b>	<b>71</b>	<b>97</b>	<b>19</b>	<b>36</b>
<b>Persentasi</b>		<b>100%</b>	<b>31,84%</b>	<b>43,50%</b>	<b>8,52%</b>	<b>16,14%</b>

Sumber: Hasil Analisis Pokja, 2024

Ketercapaian TPB Provinsi NTT menurut pilar dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut. Pilar dengan capaian tertinggi adalah pilar Sosial (36 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar Ekonomi (16 indikator dengan kategori SS) dan pilar Lingkungan (6 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi berada pada pilar Sosial dengan 43 indikator. Kategori BB dan NA tertinggi berada pilar Lingkungan dengan jumlah indikator berturut-turut sebanyak 11 indikator dan 12 indikator.

Tabel 1-b. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar Provinsi NTT

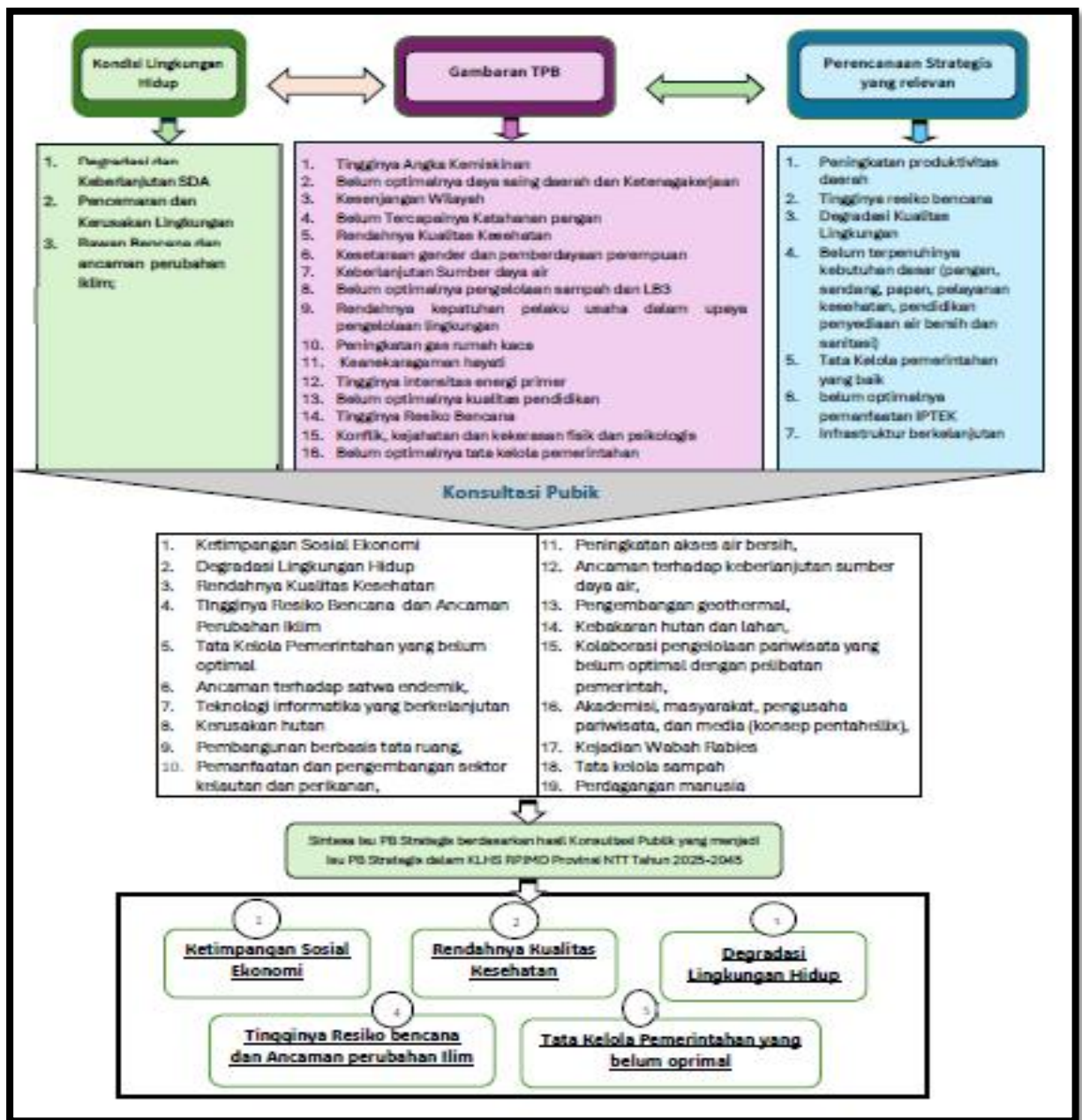
PILAR	JUMLAH INDIKATOR	Kategori Pencapaian							
		A		B		C		D	
		Jumlah	Persen tasi	Jumlah	Persen tasi	Jumlah	Persen tasi	Jumlah	Persen tasi
Ekonomi	63	16	30,16%	27	42,86%	7	11,11%	10	15,87%
HukumG Tata Kelola	18	7	38,89%	10	55,56%	1	5,56%	0	-
Lingkungan	46	6	18,37%	17	34,66%	10	20,41%	13	26,53%
Sosial	63	36	38,71%	43	46,24%	1	1,08%	13	13,68%
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>		<b>97</b>		<b>19</b>		<b>36</b>	

Sumber: Hasil Analisis Pokja, 2024

## Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal (baseline) dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi NTT. Berdasarkan kajian pencapaian TPB di Provinsi NTT, sebanyak 71 indikator TPB (31,84%) di Provinsi NTT telah mencapai target nasional, sedangkan masih terdapat 97 indikator TPB (43,50%) yang belum mencapai target nasional, 19 indikator atau 8,52% belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan 36 indikator TPB atau sebesar 16,14% tidak ada data. Adanya kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari dokumen strategis lainnya, dan isu dari masukan uji publik. Proses pelingkupan isu dilakukan dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab akibat. Kerangka analisis untuk menentukan isu prioritas dalam KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ditunjukkan pada Gambar dibawah ini :





Gambar 1-b. Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

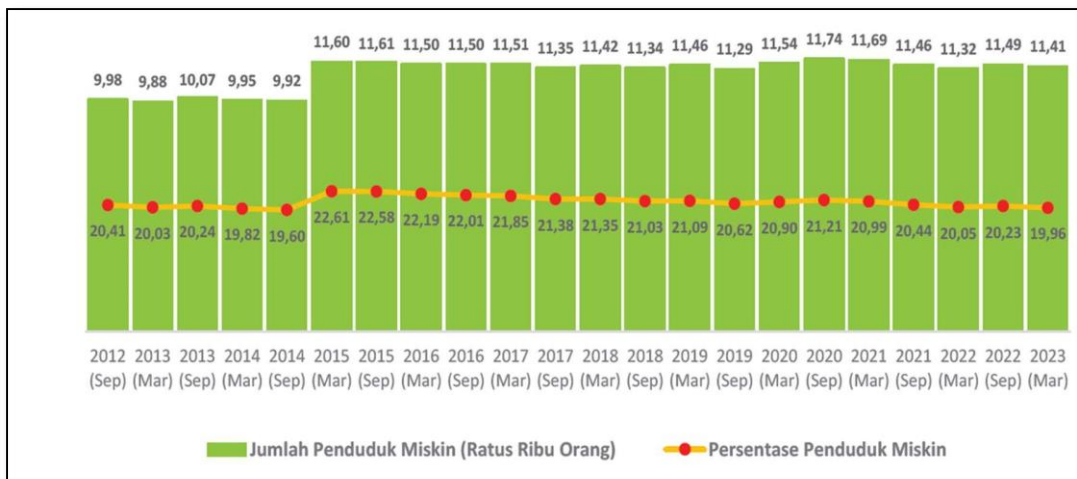
## Ketimpangan Sosial Ekonomi

### a. Tingginya angka kemiskinan

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, terdapat 13 Kabupaten dari 22 Kab/Kota se Provinsi NTT masuk dalam kategori daerah tertinggal. Kemiskinan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT.

Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar 1-c.



Gambar 1-c. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Tahun 2012-2023

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Dan jika dilihat berdasarkan tempat tinggal persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023.

Untuk jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Dan dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498,-/rumah tangga miskin/bulan.

#### b. Pembangunan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan produk Domestik Regional Bruto (RDRB) atas dasar harga konstan (ADHK).

Perekonomian provinsi NTT pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pada tahun 2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT sebesar 20.841,76 miliar rupiah kemudian diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6.282.586,7 miliar rupiah, konstruksi 7.854.706,51 miliar rupiah; informasi dan komunikasi 7.582.166,86 miliar rupiah. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar nilai PDRB di NTT, kategori ini mencakup sub kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri dari golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan; sub kategori usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut gambaran PDRB ADHK Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Tabel 1-c. Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Lapangan Usaha [Seri 2010]	[Seri 2010] PDRB ADHK Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.496.006,02	18.680.640,45	19.601.897,87	20.341.732,36	20.841.791,81
Pertambangan dan Penggalian	938.707,47	813.605,29	829.029,30	846.476,68	877.389,64
Industri Pengolahan	916.998,33	867.298,21	823.084,78	877.992,34	942.342,64
Pengadaan Listrik dan Gas	52.163,97	58.573,99	61.433,20	65.216,83	73.142,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45.252,08	47.986,36	53.428,41	54.500,52	55.840,36
Konstruksi	7.575.982,12	6.832.316,79	7.311.418,55	7.262.237,51	7.854.706,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.382.039,82	7.880.407,26	8.216.892,19	8.798.296,44	9.282.589,70
Transportasi dan Perjudangan	3.646.083,64	3.202.639,74	3.281.837,62	3.437.538,07	3.563.344,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	524.493,07	381.708,21	399.789,89	473.472,08	524.185,89
Informasi dan Komunikasi	6.118.148,35	6.849.744,12	7.040.614,08	7.354.434,13	7.582.169,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.672.523,01	2.901.458,24	2.975.719,37	3.013.244,95	3.069.460,29
Real Estate	1.657.829,41	1.632.324,91	1.680.834,90	1.731.338,05	1.771.207,07
Jasa Perusahaan	181.721,72	110.352,77	94.163,47	97.433,15	100.741,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.175.637,26	9.598.861,78	9.267.598,41	9.444.927,68	9.539.653,03
Jasa Pendidikan	5.913.237,14	6.024.750,91	5.889.973,02	5.859.343,12	6.015.492,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.564.173,72	1.632.665,10	1.779.855,17	1.797.708,38	1.870.768,13
Jasa lainnya	1.528.019,23	1.294.280,14	1.232.986,41	1.239.384,71	1.292.738,98
<b>PDRB</b>	<b>69.389.016,38</b>	<b>68.809.614,28</b>	<b>70.540.566,64</b>	<b>72.695.277,01</b>	<b>75.257.564,75</b>

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

### c. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan kerja Provinsi NTT menunjukkan jumlah orang yang bekerja pada tahun 2021 sejumlah 2.808.620 jiwa mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 2.615.263 jiwa. Walaupun jumlah pengangguran mengalami penurunan namun data menunjukkan bahwa tidak seluruh Angkatan kerja terserap. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 106.425 jiwa mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 107.128 dan Kembali menurun menjadi 63.815 jiwa pada tahun

2023. Adanya angka pengangguran terbuka menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara jumlah Angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Tabel 1-d. Angkatan Kerja Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Angkatan Kerja	Tahun2021			Tahun2022			Tahun2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja	1.543.804	1.264.816	2.808.620	1.573.176	1.342.117	2.915.293	1.579.105	1.317.796	2.896.901
Pengangguran Terbuka	59.450	50.478	109.928	62.425	44.703	107.128	47.938	45.877	93.815
Angkatan Kerja	1.603.254	1.315.294	2.918.548	1.635.601	1.386.820	3.022.421	1.627.043	1.363.673	2.990.716

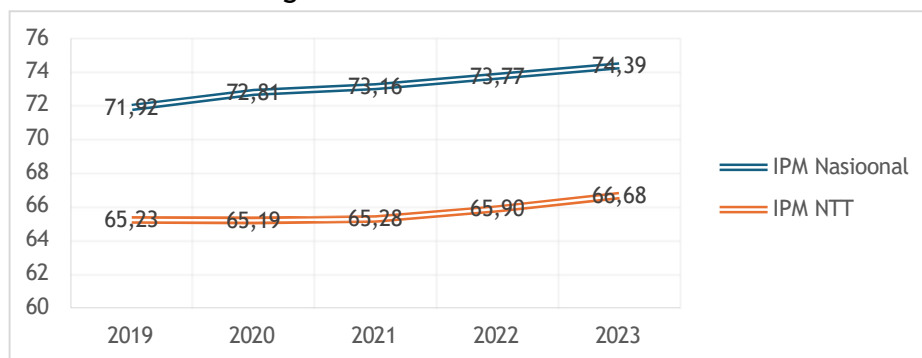
Sumber: BPSNTT,2024

Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah sedangkan biaya produksi tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Tahun 2023, penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi mulai dari tingkatan tidak tamat SD sampai yang memiliki ijazah S2/S3 terbanyak adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yakni 30,43%, yang mempunyai pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di NTT sebanyak 18.76%, lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Kejuruan sebanyak 17.82%, Diploma sebanyak 8.57% sedangkan Tingkat Pendidikan S2 atau S3 hanya sebanyak 0.24%.

#### d. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan angka IPM tiap tahun di Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan, namun Pada tahun 2020 IPM Nusa Tenggara Timur sempat turun sebesar 0,04 dari 65,23 pada tahun 2016 menjadi 65,16. Namun pada tahun 2021 IPM Nusa Tenggara Timur naik menjadi 65,28 dan meningkat menjadi 65,60 pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan kembali sebesar 0,78 menjadi 66,68 pada tahun 2023. Walaupun sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 IPM NTT mengalami peningkatan namun nilai ini masih jauh jika dibandingkan IPM Nasional. IPM NTT pada tahun 2023 menduduki urutan ke-32 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dan termasuk dalam kategori IPM sedang ( $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ).

Grafik 1-a. Perbandingan IPM Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2019-2023



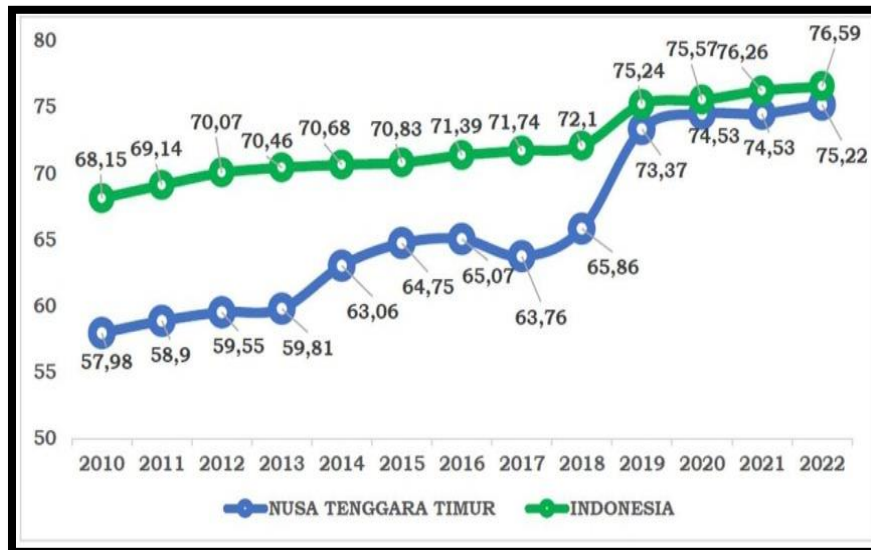
Sumber: BPS NTT, 2023



#### e. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Pada periode (2010) capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTT sebesar 57,68 poin, sementara di Tingkat nasional sebesar 68,15 poin. IDG NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 73,37 poin pada 2016, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 75,24 poin di tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi akhir periode (2022) masing-masing sebesar 75,22 poin dan 76,56 poin. Uraian dapat dilihat pada grafik perbandingan capaian IDG provinsi NTT dengan Nasional berikut.

Grafik 1-b. Perbandingan capaian IDG Provinsi NTT dan Nasional

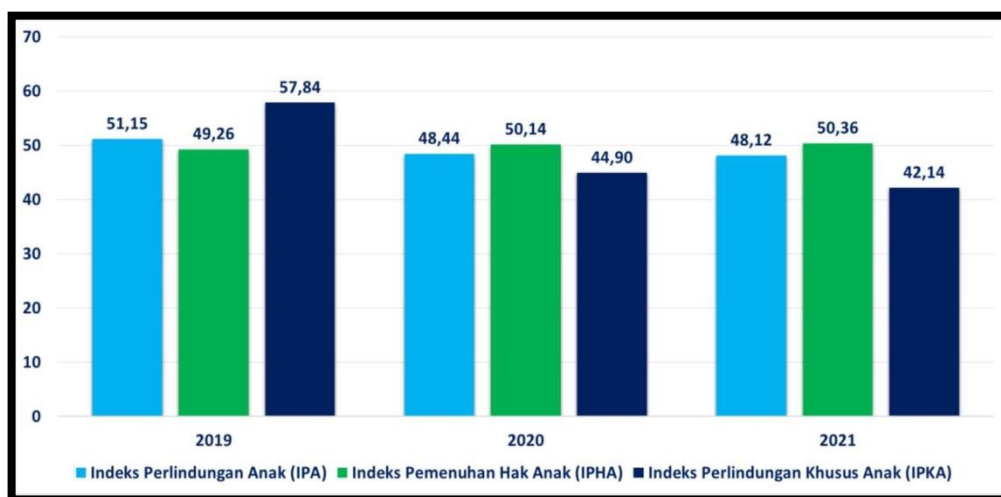


Sumber: BPS NTT, 2023

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus. Dalam 3 Tahun terakhir nilai IPA Provinsi NTT terjadi penurunan. Pada Tahun 2016 nilai IPA Provinsi NTT senilai 51,15 yang turun menjadi 48,44 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 48,12. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada Tahun 2016 nilai IPHA Provinsi NTT senilai 46,26 yang meningkat menjadi 50,14 pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 50,36 pada Tahun 2021.

Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Nilai IPKA Provinsi NTT juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada Tahun 2016 nilai IPKA Provinsi NTT yaitu 57,84 yang turun menjadi 44,60 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 42,14 pada Tahun 2021.

Grafik 1-c. IPA, IPHA dan IPKA NTT



sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2021, KemenPPPAG BPS 2022

**f. Gini Rasio**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di level 0,325 pada Maret 2023. Rasio gini mendekati 0 mengindikasikan semakin terjadinya pemerataan pengeluaran. Rasio gini turun 0,015 poin dari posisi September 2022 yang masih sebesar 0,340. Nilainya juga lebih tinggi dari posisi Maret 2022 yang sebesar 0,344.

**g. Kesenjangan Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dari 21 Kabupaten di Provinsi NTT terdapat 13 Kabupaten yang masuk sebagai daerah tertinggal Tahun 2020-2024, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, lembata, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Malaka.

Kesenjangan sosial ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi, dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi indikator utama kondisi ketertinggalan pembangunan di NTT. Berdasarkan ketidaktercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi NTT pelayanan akses infrastruktur dasar masyarakat yang belum merata meliputi akses masyarakat terhadap infrastruktur air bersih/air minum, infrastruktur jaringan telekomunikasi dan infrastruktur jaringan energi kelistrikan serta fasilitas umum lainnya seperti akses terhadap layanan perbankan.

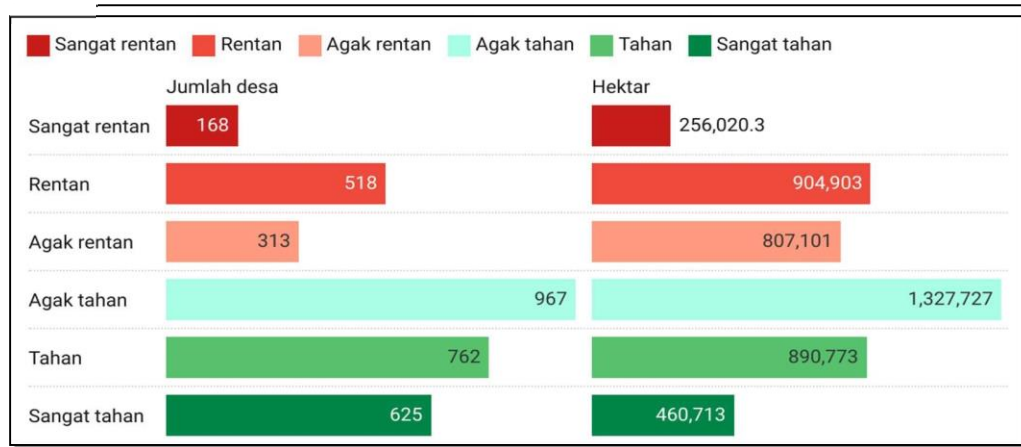
**h. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan**

Akses terhadap pelayanan pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di suatu wilayah. Jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) yang ada di Provinsi NTT akses terhadap pelayanan pendidikan yang ada masih belum optimal. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hingga tahun 2023 APM di Provinsi NTT di tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 65,68%, SMP/MTs/Sederajat sebesar 73,47 %, SMA/MA/Sederajat 58,15%.



#### ***i. Belum Tercapainya Ketahanan Pangan***

Pada tahun 2022, nilai Indeks Ketahanan Pangan NTT mencapai 68,42, yakni mengalami peningkatan dari nilai IKP pada tahun 2016 senilai 50,66. Meski telah mengalami peningkatan yang baik, rata-rata nilai IKP per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional.



Gambar 1-d. Indeks Ketahanan Pangan NTT

#### ***Rendahnya Kualitas Kesehatan***

Jika dilihat dari angka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia yang ada di Provinsi NTT masih berada pada angka 45,45%.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTT ini belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NTT. Hal ini dikarenakan tidak semua fasilitas kesehatan yang ada didukung oleh tenaga kesehatan yang mumpuni. Di dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana pendukung termasuk tenaga kesehatan yang memadai, sebagai contoh jika mengacu kepada standar WHO, jumlah dokter ideal 1:1.000. Artinya di Provinsi NTT masih kekurangan sekitar 4.500 dokter sehingga penyebarannya masih kurang dan timpang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlayani.

#### ***Degradasi Lingkungan Hidup***

##### ***a. Alih Fungsi Lahan***

Secara historis, perubahan tutupan lahan banyak terjadi di NTT melalui peningkatan luas lahan untuk permukiman dan pertanian dan di sisi lain mengurangi tutupan lahan untuk hutan lahan kering sekunder dan mangrove. Meski masih memungkinkan dilakukan strategi ekspansi untuk pengembangan beberapa sektor tertentu, namun perlu dipastikan bahwa alih fungsi lahan tersebut dilakukan pada lahan-lahan yang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya sesuai. Dengan demikian dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal.

##### ***b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***

Secara tren nilai IKLH Provinsi NTT mengalami peningkatan dan berada pada kategori baik dan

memenuhi target, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,48 poin dibandingkan dengan nilai IKLH NTT Tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan nilai IKA. Nilai IKA Provinsi NTT tahun 2022 juga lebih rendah dari target yang ditetapkan nasional yaitu 56. Sedangkan indeks lainnya telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Penurunan nilai IKA perlu diantisipasi oleh Provinsi NTT, karena berdampak pada ketersediaan sumber air yang aman dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian, maupun industri. Akses air yang berkualitas dan kontinu sepanjang tahun merupakan salah satu isu strategis di Provinsi NTT. Nilai IKTL juga cenderung menurun pada periode 2016-2022. Hal ini diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan baik tutupan lahan hutan maupun vegetasi non hutan. Kelas tutupan lahan yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu hutan sekunder dan hutan mangrove primer.

Tabel 1-e. Nilai IKLH Provinsi NTT Tahun 2016-2023

Tahun	Komponen IKLH				IKLH NTT
	IKA	IKU	IKAL	IKL	
2016	56,48	88,18	68,05	63,42	66,67
2020	56,16	86,80	70,14	58,47	73,28
2021	58,28	60,51	87,07	58,65	74,67
2022	52,62	61,52	86,66	58,75	73,46
2023	54,65	62,03	84,04	56,32	74,18

Sumber: Aplikasi IKLH KLHK RI, 2023

Dampak kerusakan hutan oleh pembakaran, perambahan, dan illegal logging adalah terbentuknya lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan (Tabel 3.38). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, luas lahan kritis di dalam kawasan 1.460.731.01 ha dengan rincian yang kritis seluas 112.885,40 dan sangat kritis 84.651,63 ha sedangkan di luar kawasan 3.156.424,31 ha dan diantaranya kritis 451.460,66 ha dan sangat kritis 580.508,64 ha

Tabel 1-f. Lahan Kritis Provinsi NTT Tahun 2022

Lahan Kritis	Luas (Ha)
Sangat Kritis	11.170,16
Agak Kritis	2.575.424,07
Kritis	808.666,66
Potensial Kritis	854.228,87
Tidak Kritis	367.478,88
<b>Grand Total</b>	<b>4.647.268,6G</b>

Sumber: BPKHTL Wilayah XIV Kupang, 2023

## ***Tingginya Resiko Bencana dan Ancaman Perubahan Iklim***

### ***1. Iklim***

Meningkatnya kejadian bencana akan memberikan dampak yang luas dan multigenerasional. Saat ini, NTT dihadapkan pada peningkatan suhu dan perubahan pola hujan. Hal ini memberikan dampak pada masyarakat, di antaranya pada berkurangnya akses air bersih akibat kemarau panjang, berkurangnya produktivitas pertanian masyarakat serta semakin rentannya panen terhadap gangguan hama, dan peningkatan kejadian angin kencang. Meski

dampak perubahan iklim banyak terdapat pada sektor-sektor berbasis lahan ini, tapi dampaknya dapat meluas pada sektor lainnya seperti kesehatan masyarakat, pemenuhan pangan, kepastian investasi, dan produktivitas tenaga kerja serta kelangsungan sektor ekonomi unggulan.

Kerentanan terhadap perubahan iklim semakin meningkat di NTT dari adanya peningkatan emisi yang dihasilkan serta masih adanya penduduk yang belum resilien terhadap bencana, baik secara kelengkapan sarana dan prasarana tangguh bencana maupun dari segi kapasitas adaptasi masyarakat secara kolektif. Emisi yang meningkat akibat aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat memperparah intensitas dampak perubahan iklim. Selain itu, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap terjadinya peningkatan bencana, seperti masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana, masyarakat yang sehari-hari memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kelompok perempuan dan disabilitas, masyarakat adat, dan lain-lain.

Isu kerentanan terhadap perubahan iklim memiliki relevansi yang kuat dengan penyelesaian TPB 13, 14, dan 15 tentang ekosistem darat, ekosistem laut, dan perubahan iklim, maupun relevansi dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan kerawanan pangan, produktivitas sektor ekonomi dan komoditas unggulan, akses air bersih, permukiman yang berkelanjutan, dan perlindungan kehati.

## **2. Bencana**

Provinsi NTT dilewati oleh beberapa patahan sesar sehingga rentan terhadap aktivitas seismik. Kondisi klimatologi wilayah dilalui oleh arus angin dari Asia dan Samudera Pasifik yang telah kehilangan Sebagian besar landungan uap air sehinggacurah hujan lebih sedikit dan cenderung kering. Secara historis, Provinsi NTT telah mengalami 576 kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, dengan angin putting beliung menjadi bencana yang paling sering terjadi, diikuti oleh banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Terdapat beberapa daerah yang diidentifikasi lebih rentan pada bencana tertentu. Kajian kerentanan terhadap risiko karhutla menunjukkan daerah-daerah dengan risiko karhutla tinggi dan sedang seperti Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Malaka, Manggarai, dan Flores Timur. Sedangkan mayoritas area dengan risiko tinggi banjir terpusat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Malaka, Sumba Timur, dan Ende.

Potensi bencana dan Matriks jumlah paparan risiko bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023, menunjukkan nilai keterpaparan untuk 11 jenis bencana untuk resiko sosial, fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan berada pada kategorisedang- tinggi

### ***Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal***

Salah satu azas penyelenggaraan good governance/ Pemerintahan yang baik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan

sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan besaran 63,65 belum mencapai target yang ditetapkan, capaian SAKIP untuk Tingkat provinsi yaitu 75.

### ***Ketertiban dan Keamanan***

Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata diseluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 63 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

## Rekomendasi KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Skenario pembangunan berkelanjutan dirumuskan berdasarkan pada proyeksi capaian indikator TPB dengan jangka waktu periode RPJMD. Pencapaian target TPB selama periode RPJMD dilaksanakan dengan menyusun serangkaian alternatif skenario tanpa upaya tambahan maupun skenario dengan upaya tambahan. Rekomendasi program dan kegiatan disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 1-g. Rekomendasi KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan		Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029		
A	Tingginya Angka Kemiskinan										
1	Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	APBD	1.537.999.900	1.691.799.890	1.860.979.879	2.047.077.867	2.251.785.654	2.476.964.219	Dinas Sosial	
	Kegiatan	a. Pembinaan dan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota									
		b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota									
		c. Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial									
2	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	APBD	34.206.489.200	34.206.489.200	34.206.489.200	34.206.489.200	34.206.489.200	34.206.489.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Kegiatan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		-	-	-	-	-		
3	Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			-	-	-	-	-		
	Kegiatan	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti									
		b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi									
4	Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	APBD	1.047.266.600	1.151.993.200	1.267.192.600	1.393.911.900	1.533.303.000	1.686.633.300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaku hukum adat yang sama berada di lintas kabupaten/kota								
5	Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	APBD	1.264.000.000	1.264.000.000	1.264.000.000	1.264.000.000	1.264.000.000	1.264.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Kegiatan	a.	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								
6	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	APBD		-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		a.	Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah								

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan		Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	
7	Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	APBD	753.397.800	828.737.600	911.611.400	1.002.772.500	1.103.049.800	1.213.354.700	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Kegiatan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
8	Program	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	APBD		-	-	-	-	-	
	kegiatan	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
9	Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	APBD		-	-	-	-	-	
	kegiatan	a. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi								
10	Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	APBD		-	-	-	-	-	Biro Ekonomi dan Kerjasama
	Kegiatan	a. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
11	Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	APBD	249.999.400	274.999.300	302.499.300	332.749.200	366.024.100	402.626.500	
	Kegiatan	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota								
12	Program	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN	APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan								
13	Program	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	APBD	446.134.000	490.747.400	539.822.100	593.804.400	653.184.800	718.503.300	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Kegiatan	a. 10								
		b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								
		c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								
14	Program	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	APBD	949.756.800	1.044.732.500	1.149.205.800	1.264.126.300	1.390.539.00	1.529.592.800	Badan Keuangan Daerah
		a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								
15	program	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	APBD	264.274.200	290.701.600	319.771.800	351.749.000	386.923.800	425.616.200	
	Kegiatan	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								
16	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	APBD	14.823.987.700	16.306.386.500	17.937.025.200	19.730.727.700	21.703.800.500	23.874.180.500	Badan Keuangan Daerah
	Kegiatan	a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
17	Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	APBD		-	-	-	-	-	Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan



No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan			Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029		
	Kegiatan	a.	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								Perlindungan Anak , kependudukan dan KB	
18	program	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			APBD		-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan									
19	Program	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			APBD		-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi									
		b.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi									
		c.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi									
20	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			APBD	317.042.000	348.746.200	383.620.800	421.982.900	464.181.200	510.599.300	
	Kegiatan	a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
		b.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									
21	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			APBD	91.528.000	100.680.800	110.748.900	121.823.800	134.006.100	147.406.800	
	kegiatan	a.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
		b.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi									
22	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			APBD	1.013.259.388.900	1.114.585.327.800	1.226.043.860.600	1.348.648.246.600	1.483.513.071.300	1.631.864.378.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan	a.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
		b.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
		c.	Pengelolaan Pendidikan Khusus									
23	Program	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			APBD	11.323.279.200	12.455.607.200	13.701.167.900	15.071.284.700	16.578.413.100	18.236.254.500	Dinas PUPR
	Kegiatan	a.	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
24	Program	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			APBD	800.317.100	880.348.800	968.383.700	1.065.222.000	1.171.744.300	1.288.918.700	Dinas ESDM
	Kegiatan	a.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									
		b.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									
25	Program	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			APBD		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan	a.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi									
26	Program	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			APBD	662.000.000	728.200.000	801.020.000	881.122.000	969.234.200	1.066.157.600	

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan			Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Kegiatan	a.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
		b.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi								
		c.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi								
		d.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
27	Program		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi								
		b.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi								
28	Program		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
29	Program		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	APBD	121.838.200	134.022.000	147.424.200	162.166.600	178.383.300	196.221.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kegiatan	a.	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar								
30	Program		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	APBD	3.347.563.900	3.682.320.300	4.050.552.300	4.455.607.600	4.901.168.300	5.391.285.100	
	Kegiatan	a.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								
31	Program		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	APBD	24.335.071.000	26.768.578.100	29.445.436.00	32.389.979.500	35.628.977.500	39.191.875.200	
	Kegiatan	a.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								
		b.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil								
		c.	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan								
32	Program		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	APBD	1.832.158.100	2.015.374.000	2.216.911.300	2.438.602.500	2.682.462.700	2.950.709.000	
	Kegiatan	a.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
		b.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								
		c.	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								
33	Program		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	APBD	2.314.896.800	2.546.386.500	2.801.025.100	3.081.127.600	3.389.240.400	3.728.164.400	
	Kegiatan	a.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan		Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029		
		b.	Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								
B	Rendahnya Kualitas Kesehatan										
1	Program	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		APBD		-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
	Kegiatan	a.	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
		b.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2	Program	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		APBD	105.152.821.700	115.668.103.800	127.234.914.200	139.958.405.600	153.954.246.200	169.349.670.800	
	Kegiatan	a.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
		b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
3	Program	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		APBD	3.046.054.400	3.350.659.800	3.685.725.800	4.054.298.400	4.459.728.200	4.905.701.000	
	Kegiatan	a.	Pendayagunaan tenaga kesehatan								
		b.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								
C	Degradasi Lingkungan										
1	program	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		APBD	23.108.093.100	25.418.902.400	27.960.792.600	30.756.871.900	33.832.559.100	37.215.815.000	Dinas PUPR
	Kegiatan	a.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		b.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota								
		c.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
		d.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2	Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional								
3	Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi								
4	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		APBD	11.323.279.200	12.455.607.200	13.701.167.900	15.071.284.700	16.578.413.200	18.236.254.500	
	Kegiatan	a.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan		Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029		
5	Program	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	APBD	4.833.632.700	5.316.996.00	5.848.696.000	6.433.565.100	7.076.921.700	7.784.613.800		
	Kegiatan	a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								
6	program	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	APBD		-	-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
7	program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	APBD	500.665.100	550.731.600	605.804.800	666.385.300	733.023.800	806.326.100	Dinas Perhubungan	
	Kegiatan	a.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
8	Program	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	APBD	457.970.400	503.767.400	554.144.200	609.558.600	670.514.500	737.566.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		a.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
9	program	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	APBD		-	-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								
10	program	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	APBD		-	-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								
11	Program	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	APBD		-	-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								
12	program	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	APBD		-	-	-	-	-		
	Kegiatan	a.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								
		b.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								
		c.	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
13	program	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	APBD		-	-	-	-	-		

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan			Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Kegiatan	a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi								
14	program	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi								
15	program	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		APBD	17.361.641.600	19.097.805.700	21.007.586.300	23.108.345.000	25.419.179.400	27.961.097.400	
	Kegiatan	a.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								
		b.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								
		c.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								
16	Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								
17	Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		APBD	501.269.900	551.396.900	606.536.600	667.190.300	733.909.300	807.300.300	
	Kegiatan	a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			-	-	-	-	-	
18	Program	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		APBD		-	-	-	-	-	Dinas ESDM
	kegiatan	a.	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan								
		b.	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								
		c.	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								
		d.	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi								
		e.	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi								
		f.	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi								
		g.	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi								
		h.	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral								
		i.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi								
D	Tingginya resiko bencana dan ancaman perubahan iklim										
1	Program	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		APBD	2.210.008.800	2.431.009.700	2.674.110.600	2.941.521.700	3.235.673.800	3.559.241.300	Badan Penanggulangan
	Kegiatan	a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								
		b.	Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Masyarakat ditingkat Provinsi								

		Sumber		Pagu Indikatif		Instansi
--	--	--------	--	----------------	--	----------

No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan		Pendan aan	Pagu Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana	
2	Program	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		APBD	4.332.623.300	4.765.885.600	5.242.474.200	5.766.721.600	6.343.393.700	6.977.733.200	an Bencana Daerah
	Kegiatan	a.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								
		b.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
E	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal					-	-	-	-		
1	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		APBD	5.275.097.100	5.802.606.800	6.382.867.500	7.021.154.200	7.723.269.700	8.495.596.600	Inspektorat
	Kegiatan	a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
2	Program	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		APBD	6.018.807.500	6.620.688.200	7.282.757.100	8.011.032.700	8.812.136.00	9.693.349.700	Biro Pengadaan barang dan Jasa
	Kegiatan	a.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
3	Program	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		APBD	1.118.734.200	1.230.607.600	1.353.668.400	1.489.035.200	1.637.938.800	1.801.732.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan	a.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
4	Program	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		APBD	5.100.090.700	5.610.099.800	6.171.109.800	6.788.220.800	7.467.042.800	8.213.747.100	
	Kegiatan	a.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
5	program	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		APBD		-	-	-	-	-	
	Kegiatan	a.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								
6	Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		APBD	1.142.760.100	1.257.036.100	1.382.739.700	1.521.013.600	1.673.115.000	1.840.426.500	Biro Hukum
	Kegiatan	a.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								
7	program	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		APBD	2.723.505.000	2.995.855.500	3.295.441.100	3.624.985.100	3.987.483.700	4.386.232.100	Bapperida
	Kegiatan	a.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
		b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
8	Program	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		APBD	667.570.800	734.327.800	807.760.600	888.536.700	977.390.400	1.075.129.400	
	Kegiatan	a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								



No	Program / Kegiatan / Indikator kegiatan		Sumber Pendaan	Pagu Baseline	Pagu Indikatif					Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029		
9	Program	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		APBD	2.967.935.700	3.264.729.300	3.591.202.200	3.950.322.400	4.345.354.700	4.779.890.100	
	Kegiatan	a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
10	Program	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		APBD	2.117.426.500	2.329.169.200	2.562.086.100	2.818.294.700	3.100.124.200	3.410.136.700	Pol PP
	Kegiatan	a.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
		b.	Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi								

Sumber: Hasil Analisis, 2024